

IMPLEMENTASI PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SUMBERLELE

Nourma Ulva Kumala Devi¹, Supriyanto², Totok Hariyanto³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga, Indonesia

Email: nourmaulva@upm.ac.id¹, supriyanto@upm.ac.id², totokhariyanto1977@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sumberlele serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi program PKH untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Sumberlele dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan sangat penting karena keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah peserta PKH, pendamping PKH dan aparat desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi PKH di Desa Sumberlele sudah berjalan baik, hal tersebut dapat dilihat dari informasi yang didapatkan dari pihak terkait yaitu masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH, Pendamping PKH, dan Kepala Desa dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai mekanisme yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam prakteknya dilapangan ada juga sebagian dari keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang tidak berkomitmen terhadap kewajibannya, seperti tidak menghadiri posyandu oleh ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, bantuan anak sekolah digunakan untuk keperluan lain bukan keperluan pendidikan, tidak menghadiri pertemuan kelompok yang diadakan sebulan sekali. faktor pendukung dan penghambat dari implementasi PKH yaitu dilihat dari komunikasi pendamping dan masyarakat sudah baik, tercukupinya sumber daya finansial hal ini dari integritas para implementator pelaksana program PKH, Sikap Pendamping PKH yang bertugas mendampingi Keluarga Penerima manfaat sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan pendamping dalam mendampingi keluarga penerima manfaat dalam pertemuan kelompok. Struktur organisasi dalam implementasi PKH di Desa Sumberlele sudah baik. Hal ini dikarenakan struktur organisasi dibentuk dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sehingga jelas bagi pelaksananya. Selain itu juga terdapat *Standard Operational Procedur* (SOP) yang merupakan perkembangan dari tuntutan internal terhadap kepastian waktu, sumber daya dan kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Hal ini dapat dilihat dengan adanya buku pendoman

pelaksanaan PKH yang selalu dibawa oleh pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Pengentasan Kemiskinan.

Abstract

This research aims to determine and analyze the implementation of poverty alleviation through the Family Hope Program (PKH) in Sumberlele Village and to describe the supporting and inhibiting factors for the successful implementation of the PKH program to alleviate poverty in Sumberlele Village using policy implementation theory according to George C. Edward III view that policy implementation is very important because the success of a policy is influenced by four variables namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. These four variables are related to each other. The method in this research uses a qualitative approach a type of descriptive method with data collection through observation, interviews, and documentation. Research informants were PKH participants, PKH assistants and village officials. The results of this research show that the implementation of PKH in Sumberlele Village has gone well, this can be seen from the information obtained from related parties namely the community who received PKH assistance, PKH Facilitators, and the Village Head in implementing the Family Hope Program (PKH) has carried out their respective duties and responsibilities are in accordance with the mechanism based on Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of years 2018 concerning the PKH Family Hope Program (PKH). In practice in the field there are also some families who receive PKH assistance who are not committed to their obligations, such as not attending posyandu by pregnant women and children aged 0-6 years, school children's aid being used for other purposes not educational purposes, not attending group meetings held every month. Supporting and inhibiting factors for the implementation of PKH are seen from good communication between facilitators and the community, adequate financial resources this comes from the integrity of the PKH program implementers, the attitude of PKH facilitators who are tasked with accompanying beneficiary families is good. This can be seen from the companion's activeness in accompanying beneficiary families in group meetings. The organizational structure in implementing PKH in Sumberlele Village is good. This is because the organizational structure was formed from the Probolinggo Regency Social Service so that it is clear for the implementers. Apart from that there is also a Standard Operational Procedure (SOP) which is a development of internal demands for certainty of time, resources and the need for uniformity in complex and extensive work organizations. This can be seen from the existence of a guidebook for implementing PKH which is always carried by PKH assistants when implementing it.

Keywords: Implementation, Family Hope Program (PKH), Poverty Alleviation.

A. PENDAHULUAN

Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Terbebas dari belenggu kemiskinan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan ini merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan dalam kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Fenomena kemiskinan dan masalah sosial yang terus menerus dikaji tidak dapat dipungkiri dalam upaya-upaya penanggulangan yang dicanangkan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satu indikator utama untuk keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan secara nasional. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan sebuah negara diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.

Menurut Oscar Lewis kemiskinan muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti: malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti: birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya (Suharto, 2015).

Soekanto (2009:3321) mengatakan bahwa kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental dan juga fisiknya dalam kelompok tersebut (Daud & Marini, 2018). Masalah kemiskinan yang sering berkembang di masyarakat diperlukan suatu kebijakan sebagai realisasi dari fungsi dan tugas negara serta dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah masih dapat dijumpai hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah yang diaplikasikan dalam wujud kebijakan dan program-program bantuan sosial baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin agar dapat hidup layak dan dapat melakukan fungsi sosialnya dengan baik.

Kemiskinan di Kabupaten Probolinggo masih menjadi problem besar. Sejauh ini, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 tertinggi ketiga dibawah kabupaten Sampang dan kabupaten Bangkalan, yang mencapai penduduk miskin 205,02 ribu jiwa atau mencapai 17,19% penduduk miskin di Kabupaten probolinggo (BPS Provinsi Jawa Timur, 2023). Apalagi dampak dari penyebaran virus COVID-19 yang menyebar menyeluruh sampai ke pelosok Desa dan menyebabkan masyarakat kesulitan mencari pekerjaan yang lebih baik. Selama pandemi penghasilan masyarakat tidak menentu, karena minimnya daya beli. Pandemi juga menyebabkan pemberhentian pekerja bahkan bisa juga di PHK sehingga sebagian orang kehilangan pekerjaan karena perusahaan mengurangi pengeluaran selama masa pandemi yang disebabkan menurunnya angka produksi, Hal ini menyebabkan angka pengangguran meningkat. serupa yang terjadi di Desa Sumberlele tingginya pengangguran dan mengakibatkan sebagian warganya memilih untuk kerja buruh tani dan buruh harian lepas, dan tidak menutup kemungkinan ada juga yang menjadi pegawai tapi sangat minim, sesuai data DTKS Kemensos angka kemiskinan Desa Sumberlele berkisaran 22% (Kemensos RI, 2023).

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya adalah dengan meminimalisir warganya yang berada dalam kemiskinan. melalui berbagai program bantuan sosial yang dipadukan dengan pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 telah menerbitkan Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan sosial.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), pasal 1 ayat 1 Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin yang rentan dan terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, dan diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dalam Pasal 2 menyebutkan; tujuan dari Program Keluarga Harapan antara lain; untuk meningkatkan tarafhidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. mengurangi beban-beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin serta menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga. Adapun sasaran penerima bantuan PKH sesuai pasal 3 yaitu;

merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial, 2018).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menjadi sebuah dasar dalam penyelenggaraan program bantuan sosial yang tertera dalam data terintegrasi pada aspek kesejahteraan sosial yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial, dimana penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Adapun mekanisme pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 ayat 1; Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui tahapan, Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi, Pengendalian atau Penjaminan Kualitas, Penetapan, dan Penggunaan. Sedangkan dalam pasal 3 ayat 2 disebutkan; kriteria Data DTKS meliputi; Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Keterpencilan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, dan Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri (RI, 2021).

Sejak mulai diimplementasikan Program Keluarga Harapan ini terus berinovasi sehingga terus mengalami perkembangan. Arah kebijakan PKH bukan hanya sekedar memastikan bantuan tepat sasaran dan membantu kelancaran penyaluran bantuan sosial, utamanya adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang graduasi, bukan hanya karena tidak memenuhi syarat kepesertaan, namun KPM PKH juga bisa mandiri dan sejahtera.

Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti bahwa jumlah Graduasi KPM PKH, baik yang dilakukan secara mandiri atau melalui dorongan Pendamping PKH, menyebutkan pada satu tahun terakhir Desa Sumberlele secara bertahap mengalami kenaikan graduasi yang signifikan. Data penduduk Desa sumberlele pada tahun 2022 terdiri dari 1.615 jiwa, sedangkan yang mendapatkan bantuan PKH sebesar 7,13% atau 115 jiwa, dan pada tahun 2023 terjadi penambahan penduduk yaitu terdiri dari 1.635 jiwa akan tetapi penerima bantuan PKH menurun menjadi 5,08% atau 92 jiwa (Kemensos RI, 2023).

Desa Sumberlele yang mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai buruh tani dan pekerja harian lepas, Sehingga penghasilan yang didapatkan tidak pasti. Rendahnya

penghasilan menyebabkan penghasilan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik segi Pendidikan atau kesehatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keadaan ekonomi warga Desa Sumberlele masih berada pada perekonomian menengah ke bawah. Sehingga program-program dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dibutuhkan dan diharapkan bagi masyarakat setempat.

Melalui Program Keluarga Harapan, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan diarahkan untuk menjadi centre of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial secara nasional. Lima komponen dari tujuan Millenium Development Goals (MDGs) yang akan terbantu oleh Program Keluarga Harapan yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, serta pengurangan angka kematian ibu melahirkan (Kartiawati, 2017).

Program Keluarga Harapan yaitu merupakan suatu program bantuan langsung tunai diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang terdiri dari komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Bantuan yang diterima oleh setiap KPM sesuai kriteria komponen yang dimiliki apabila di setiap komponen sudah lepas dari kriteria ataupun sudah melalui Graduasi Mandiri. Misalnya di Kriteria kesehatan dalam hal ini Anak Usia 0 sampai 6 (enam) tahun akan berubah saat komponen tersebut masuk ke komponen pendidikan anak sekolah dasar maka otomatis jumlah bantuan akan berubah nominalnya. Dengan adanya program bantuan sosial PKH ini sangat membantu bagi warga Desa Sumberlele untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraannya.

Kesejahteraan sosial sebagai sebuah gagasan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih layak, menyediakan kesempatan kerja, makna kemanusiaan, memberikan keamanan dan perlindungan dari segala ancaman dan adanya jaminan kehidupan ekonomi produktif dan stabil bagi setiap individu. Tujuan kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya syarat sosial, finansial, kesehatan dan rekreasional dari individu-individu dalam masyarakat.

Kesejahteraan sosial berupaya untuk meningkatkan keberfungsian sosial untuk semua kelompok lapisan masyarakat baik kelompok kaya ataupun miskin (Undang-Undang RI, Pasal 1 Ayat 1, Nomor 11 tahun 2011).

Berdasarkan data yang didapatkan dari salah satu pendamping PKH kecamatan kraksaan khususnya pendamping PKH Desa Sumberlele Peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di desa sumberlele kecamatan kraksaan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 60 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 92 jiwa, dengan rincian pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Kriteria Penerima Bantuan PKH Desa Sumberlele Tahun 2024

No	Kriteria Komponen Yang Mendapatkan Bantuan PKH	Jumlah
1	Ibu hamil/menyusui	0
2	Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun	12
3	Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat	26
4	Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat	21
5	Anak sekolah menengah atas/madrasah Aliyah atau sederajat	11
6	Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun	22
7	Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat	0
TOTAL		92

Sumber: Pendamping PKH Desa Sumberlele, 2024

Dari data tabel diatas menunjukkan jumlah penerima bantuan di setiap komponen, akan tetapi data tersebut harus disinkronkan saat kelapangan apakah data tersebut sesuai atau tidak. Data tersebut disinkronkan dengan Data Pusdatin (Pusat Data Informasi) yang diterima Pendamping PKH dan kemudian divalidasi. Sehingga didapatkan jumlah yang berhak untuk menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai kriteria komponen. Data setiap komponen berbeda tergantung saat validasi di lapangan, prakteknya bisa jadi dalam masing-masing komponen baik itu Pendidikan, kesehatan, atau kesejahteraan sosial ada yang

mendapatkan bantuan 2 sampai tiga komponen dalam satu keluarga maka secara otomatis semua mendapatkan bantuan sosial. Sebagai sebuah program yang direncanakan secara terpusat, dalam pelaksanaan terdapat banyak aspek dan pihak yang terlibat. Maka dalam hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, sering dilakukan untuk mengukur bagaimana kemajuan dan perkembangan Program Keluarga Harapan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial untuk masyarakat Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mahulette et al., 2022) dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Negeri Assilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah”. Hasil dalam penelitian ini, bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah ada di Desa Negeri Assilulu sejak tahun 2017 akan tetapi pada tahun tersebut belum sepenuhnya terealisasi dengan baik sampai dengan tahun 2020. Program PKH ini telah memberikan keringanan dalam hal pendidikan, meliputi SD, SMP dan SMA, dan kesehatan bagi ibu hamil/nifas maupun balita serta kesejahteraan sosial bagi disabilitas berat. Bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan tunai maupun non tunai yang bersyarat untuk keluarga miskin. Sementara faktor permasalahan yang terjadi yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dengan baik, hal ini karena tidak terpenuhinya syarat untuk mendapatkan bantuan PKH. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai peristiwa yang diteliti dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Dalam penelitian ini variabel yang diukur meliputi komponen PKH yaitu, Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan sosial. Hadirnya program PKH ini dapat memenuhi serta memperhatikan proses kesejahteraan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang layak serta memenuhi hak atas kebutuhan masyarakat demi tercapainya kebutuhan sosial.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Finky Anbia, 2022) penelitian ini berjudul “Efektivitas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Bumi Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas penyaluran bantuan PKH. Walaupun sudah dibentuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga

Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sebagai upaya memutus rantai kemiskinan, akan tetapi kenyataannya Desa Bumi Raya belum ada pengurangan jumlah peserta penerima bantuan karena pengunduran diri. Hal ini diperlukan petugas pendamping PKH lebih extra untuk memberikan edukasi kepada peserta PKH sehingga peserta yang memang mampu bisa sadar dengan sendirinya kalau mereka sudah mampu atau sejahtera. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari kaidah-kaidah hukum yang berlaku kemudian dilakukan lagi penelitian dengan cara langsung turun kelapangan untuk mengumpulkan informasi secara langsung. Hasil penelitian ini, bahwa peraturan Menteri tersebut belum efektif dalam mengentaskan kemiskinan dikarenakan kurang sadarnya dari peserta penerima bantuan PKH apabila sudah sejahtera.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Sri Ramayanti, 2022) dengan judul “Program Keluarga Harapan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Bukit Kemuning)”. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan bukit kemuning sudah berpatokan kepada peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 dan sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan rutusnya pemberian bantuan ini kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baik dalam bentuk barang ataupun uang yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara kepada informan yang dipilih dengan teknik snowball sampling. Kemudian penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut Merilee S. Grindle sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui manfaat Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Bukit kemuning dan untuk mengetahui Implementasi Peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Di Kecamatan Bukit Kemuning. Hasil dalam penelitian ini jika dilihat dari efektifitas tujuan utama dari Program Keluarga Harapan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat menuai banyak manfaat untuk masyarakat penerima PKH di Kecamatan Bukit Kemuning, beberapa manfaat dari program PKH untuk masyarakat penerima manfaat PKH ini dapat dilihat dari aspek pendidikan, dengan adanya PKH dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun, aspek kesehatan dimana

meningkatkan kualitas kesehatan yang mewajibkan peserta untuk memeriksa kandungannya dan balita secara rutin ketempat pemeriksaan yang telah disediakan dan dari aspek ekonomi dapat meringankan kebutuhan pokok penerima PKH.

Dari penelitian terdahulu diatas, tidak melakukan penelitian terkait apa saja Hambatan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Oleh karena itu, kebaruan dan pembeda dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari tahu terkait apa saja hambatan dalam pelaksanaan program bantuan PKH itu sendiri.

Setelah dilakukan studi literatur dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka dilakukan penelitian baru dengan judul “Implementasi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sumberlele”. Program Bantuan Sosial PKH ini bagi warga Desa Sumberlele khususnya bagi keluarga miskin yang mempunyai komponen syarat bantuan PKH, merupakan secercah harapan menuju masyarakat yang sejahtera.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data yang mendalam tentang pengalaman dan persepsi orang-orang yang terlibat dalam program tersebut. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Lexy J. Moleong, 2007). Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Kemudian, jenis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk memberikan gambaran secara deskripsi dan jelas tentang bagaimana program bantuan PKH diimplementasikan di Desa Sumberlele dan bagaimana dampaknya terhadap kemiskinan di Desa tersebut (Sudjarwo, 2011).

Pemilihan metode penelitian kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi subjek penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mencakup realitas sosial. Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Nasution,

1996). Suharsimi Arikunto juga menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif yaitu jika peneliti ingin mengetahui status sesuatu dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2010).

Dalam penelitian deskriptif, penulis akan mencoba untuk melihat kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, dan kemudian diilustrasikan sebagaimana apa adanya. Nana Sudjana dan Ibrahim mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan (Nana Sudjana & Ibrahim, 2012).

Peneliti memilih penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Sumberlele. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini selain untuk menganalisis Program Keluarga Harapan (PKH) juga untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumberlele.

Lokasi penelitian merupakan daerah atau tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Lokasi dalam penelitian ini peneliti memilih Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sedangkan yang menjadi objek penelitian yaitu implementasi/pelaksanaan program bantuan PKH. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini menurut (Sugiyono, 2008) adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap relevan memiliki informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Pendamping PKH dan Masyarakat penerima bantuan program PKH. sample yang diukur dalam penelitian ini merupakan komponen PKH yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial.

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Adapaun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data dalam penelitian dilakukan secara deskriptif dalam yang disusun berdasarkan urutan pembahasan yang sudah direncanakan.

Teori Implementasi Kebijakan

Menurut teori implementasi kebijakan, implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik (Dwi Nurani, 2029).

Sedangkan menurut teori dari George C Edward III seorang teoritikus kebijakan publik berpandangan bahwa implementasi kebijakan sangat penting karena keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Komunikasi mencakup pertukaran informasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi dana, waktu, dan personel yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi merujuk pada sikap dan motivasi para pelaku kebijakan. Struktur birokrasi mencakup aturan, prosedur, dan hirarki dalam organisasi pemerintahan (AG. Subarsono, 2018).

1. Komunikasi

Keberhasilan suatu Implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, kompetensi implementator dan sumberdaya finansial. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh orang yang menjalankan kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika orang yang menjalankan kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat melaksanakan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun, jika orang yang menjalankan kebijakan memiliki sikap atau pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses pelaksanaan kebijakan juga tidak akan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi bertugas untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Keempat variabel implementasi diatas dipandang krusial oleh setiap implementor dalam menjalankan kebijakan publik. Keempat variabel tersebut saling berinteraksi satu sama lain, artinya tidak adanya satu variabel, maka tiga variabel lainnya akan berpengaruh dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan publik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sumberlele

Implementasi kebijakan publik sering dianggap hanya sebagai tahap pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan. Namun, kenyataannya, tahap implementasi sangat penting karena suatu kebijakan tidak akan memiliki arti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, implementasi menjadi tahap yang sangat penting dalam siklus kebijakan publik karena implementasi yang baik dapat memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

1. Program Keluarga Harapan

Sebelum melakukan wawancara secara langsung dengan pendamping PKH. Terlebih dahulu saya sebagai seorang peneliti mempersiapkan diri serta beberapa instrument wawancara. Peneliti melakukan observasi awal terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Sumberlele. Proses penelitian ini berupa Observasi, Wawancara langsung dan dokumentasi.

Berdasarkan observasi, kehadiran Program Keluarga Harapan ini ditengah masyarakat miskin sangat membantu dan mengurangi beban keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti, dalam membiayai sekolah anak-anak, terbantu memenuhi gizi untuk bayi maupun balita dalam pelayanan posyandu. Dengan demikian PKH Merupakan program yang dapat memberikan kesejahteraan untuk Masyarakat Miskin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Mahtumah sebagai Pendamping PKH Desa Sumberlele yang mengatakan bahwa terdapat tiga program dalam PKH, yaitu: pertama pendidikan, dalam program ini ada komponen yang mencakup anak sekolah SD.SMP dan SMA. Kedua Kesehatan, dalam program kesehatan komponennya termaksud ibu hamil/nifas, bayi, balita dan anak pra-sekolah. Ketiga Kesejahteraan Sosial, komponennya mencakup penyandang disabilitas berat, dan lansia usia 70 tahun keatas.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Kustatiyaningsih ia mengatakan bahwa dengan adanya program ini sangat membantu keluarga kami dalam membiayai sekolah anak-anak, dulu beban tanggungan sekolah anak kami yang pertama SMA kelas 2 dan SD, jumlah yang dikeluarkan lumayan besar. Dengan adanya PKH ini dapat membantu kami untuk kebutuhan sekolah anak.

Senada seperti yang diatas, hasil wawancara peneliti dengan ibu Wiwin Yuliani ia mengatakan bahwa dengan adanya PKH sangat membantu keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan gizi yang sangat baik buat anaknya, karena selain mendapatkan pelayanan dari posyandu bantuan PKH juga dapat membantu pemenuhan kebutuhan untuk balita saya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Aesya Sipak Iya mengatakan bahwa bantuan yang diterima dari PKH ada dalam bentuk tunai dan non-tunai. Walaupun dalam bentuk non-tunai keluarga kami sangat sangatlah senang karena bisa merasakan manfaat dari dari program ini. Karena dengan uang tersebut dapat membantu untuk membiayai keperluan sekolah anak saya.

Dari beberapa hasil wawancara yang dimulai dari pihak pendamping PKH, jawaban yang sama juga diutarakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lainnya seperti ibu Upaida,

ibu Muntiari, dan ibu Musiran. Jawaban semuanya tetap sama, hanya saja dengan penjelasan bahasa yang berbeda, seperti jawaban yang telah dijelaskan diatas penulis dapat mengetahui dan memahami betul mengenai apa saja program keluarga harapan ini dalam pengentasan kemiskinan. Adapun berupa program yang diberikan kepada masyarakat yang menerima bantuan PKH ini dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kehidupan bagi masyarakat itu sendiri dan mendapatkan layanan fasilitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk seluruh anggota keluarga sesuai kebutuhan mereka. Terdapat tiga program dari PKH untuk masyarakat penerima bantuan sosial PKH.

Pertama Pendidikan, dimana semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas untuk kehidupan mereka dan membangun prestasi untuk kemajuan Bangsa ini. Program PKH ini sangatlah membantu dan memberi dampak yang sangat positif didunia baik pendidikan untuk mendorong anak untuk sekolah SD, SMP dan SMA.

Kedua kesehatan, sama halnya dengan pendidikan kesehatan sangatlah diperhatikan karena kesehatan itu sangat berharga bagi kehidupan kita. Maka dari itu diperlukan tingkat pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk pemerataan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Dengan rendahnya penghasilan sehingga menyebabkan keluarga yang kurang mampu tidak bisa memenuhi kubutuhan kesehatannya dengan sangat baik. Dengan hadirnya PKH program ini berusaha untuk meringankan dan meningkatkan kesehatan pada ibu hamil agar proses kesehatannya selalu terjaga dengan baik.

Ketiga kesejahteraan sosial, permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang sejauh ini mengakibatkan bahwa ada masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya karena belum memperoleh pelayanan sosial dengan baik. Hadirnya program PKH ini dapat memperhatikan proses kesejahteraan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang layak serta memenuhi hak atas kebutuhan masyarakat demi tercapainya kebutuhan sosial.

Ibu Siti Mahtumah selaku pendamping PKH, mengatakan bahwa, menurut nya PKH adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu menjadi masyarakat mampu, dan perubahan pola pikir sangat mempengaruhi dalam dalam PKH. Karna PKH tidak hanya program keluarga harapan saja tetapi bagaimana merubah pola pikir masyarakat yang tidak bergantung ke program tetapi bagaimana juga bisa untuk lebih mandiri. Imbuhnya sejak 2017 Masyarakat Desa sumberlela mendapatkan bantuan PKH berbagai macam kegiatan dan inovasi dalam prakteknya yang dilakukan Pendamping PKH untuk merubah pola pikir masyarakat miskin agar menjadi keluarga sejahtera. Hal ini dilakukan dengan mengadakan

petemuan Setiap bulannya 3-4 kali pertemuan oleh pendamping PKH dengan keluarga penerima manfaat PKH.

Nominal bantuan yang diberikan kepada KPM bervariasi tergantung komponen syarat PKH yang dimiliki dan dibagikan 3 bulan sekali, Pertama pendidikan bantuan yang didapat untuk pendidikan berjumlah untuk masing-masing sekolah seperti SD: Rp 225.000, SMP: Rp 375.000, SMA: Rp 500.000, sehingga dari uang inilah para orang tua bisa membiayai anaknya yang sedang sekolah seperti membayar uang SPP, beli peralatan menuli, seragam dan lain-lain, Sehingga anak bisa sekolah dengan baik. Manfaat dari uang yang didapatkan bertujuan untuk meringankan orang tua untuk membiayai keperluan anak sekolah.

kedua kesehatan, merujuk pada kategori ibu hamil dan balita nominal bantuan yang diterima sebesar Rp 300.000. Ketiga kesejahteraan sosial, merujuk pada kategori lansia dan disabilitas berat nominal bantuan yang diterima Rp 600.000. Dalam melakukan penelitian ini ibu Siti Mahtumah mengatakan bahwa yang berperan atau terlibat dalam program PKH ini adalah pendamping dan pemerintah Desa Sumberlele. Karena pemerintah merupakan *stackholder* dari program ini sehingga harus ada nya kerjasama antara keduanya.

Pendamping PKH ibu Siti Mahtumah mengatakan bahwa jika terdapat penyalagunaan dalam menerima bantuan PKH maka orang tersebut akan diberikan sanksi berupa surat peringatan dan pendamping akan turun langsung kerumah-rumah keluarga penerima manfaat KPM karena uang itu hanya untuk keperluan sekolah anak, orang tua hanyalah pengurus yang mengurus untuk kebutuhan sekolah anak.

Keinginan dari pendamping PKH sangat menginginkan program keluarga harapan ini berhasil, dalam arti ketika pemerintah memberikan bantuan harus adanya timbal balik dari masyarakat ke pemerintah dalam hal ini apa yang suda diaturkan dalam program ini harus dilaksanakan misalnya P2K2 Setiap bulan. Jadi yang di inginkan dari ibu Siti Mahtumah selaku pendamping PKH jangan saja hanya mendapatkan hak tetapi kewajiban tidak dijalankan.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor penghambat dan pendukung keberhasilan implementasi program PKH dalam mengentaskan kemiskinan sesuai teori dari George C Edward III yaitu, dapat dilihat dari empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur organisasi.

1) Komunikasi

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana (George C Edward III dalam Deddy 2016:58). Komunikasi yang disampaikan

oleh Dinas Sosial kepada petugas dan pendamping PKH Kabupaten Probolinggo khususnya pendamping PKH Desa Sumberlele sudah baik dan jelas. Informasi yang disampaikan oleh Dinas Sosial berhubungan dengan pelaksanaan PKH di lapangan. Selain itu juga berhubungan dengan penambahan dan pengurangan masyarakat yang menerima bantuan PKH. Namun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan PKH di Desa Sumberlele yaitu yaitu kurangnya kemampuan keluarga penerima manfaat dalam memahami materi yang disampaikan oleh pendamping PKH. Hal ini terlihat ketika pertemuan kelompok yang membahas materi lanjutan dari materi sebelumnya, banyak dari keluarga penerima manfaat yang tidak mengingat materi yang disampaikan sebelumnya oleh pendamping PKH. Penyampaian informasi tentang penyaluran dana PKH akan sangat diingat dan dipahami oleh keluarga penerima manfaat.

2) Sumber Daya

Menurut George C Edward III dalam Oktaviani dan Muchtar (2019:264) sumber daya merupakan hal yang penting dalam suatu program atau kebijakan baik itu sumber daya manusia maupun non manusia yaitu meliputi staf dan fasilitas yang cukup dalam menunjang pelaksanaan program. Apabila implementor kekurangan sumber daya maka implementasi tidak akan berjalan efektif (George C Edward III dalam Alman 2018:4). Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil penelitian, sumber daya dalam mendukung keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Sumberlele sudah cukup efektif. Hal ini terlihat dari aktifitas Pendamping PKH saat memecahkan masalah KPM yang terjadi seperti kehilangan Kartu ATM penyaluran bantuan. Sehingga dalam pelaksanaan bantuan PKH berjalan lancar.

3) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sikap demokratis (George C Edward III dalam Alman 2018:4). Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai peraturan yang ditetapkan (Oktavia, 2018:7).

Sikap Pendamping PKH yang bertugas mendampingi Keluarga Penerima manfaat sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan pendamping dalam mendampingi keluarga penerima manfaat dalam pertemuan kelompok. Namun yang

menjadi hambatan dalam keberhasilan implementasi ini yaitu kurangnya kesadaran Keluarga Penerima Manfaat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Hal ini dapat dilihat ketika masih ada sebagian yang tidak menghadiri pertemuan kelompok yang diadakan sebulan sekali, kadang terlambat datang ketika pertemuan, tidak menghadiri posyandu, tidak menggunakan dana bantuan sebagaimana mestinya seperti dana bantuan untuk pendidikan anak dibelikan ke hal lain yang bukan kebutuhan pendidikan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara kebijakan. Struktur Organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi suatu kebijakam (Oktavia, 2018:7) dalam

implementasi PKH di Desa Sumberlele struktur organisasi sudah baik. Hal ini dikarenakan struktur organisasi dibentuk dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sehingga jelas bagi pelaksananya. Selain itu juga terdapat *Standard Operational Procedur* (SOP) yang merupakan perkembangan dari tuntutan internal terhadap kepastian waktu, sumber daya dan kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. *Standard Operational Procedur* (SOP) dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sumberlele sudah diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya buku pedoman pelaksanaan PKH yang selalu dibawa oleh pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dalam pelaksanaannya sudah berpatokan kepada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dan buku pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Sumberlele dilihat dari tiga tahapan yaitu tahapan pengorganisasian, interpretasi dan penerapan. Faktor penghambat dan pendukung keberhasilan Implementasi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sumberlele ada 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur organisasi. Komunikasi dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi oleh Dinas Sosial, Sekretariat UPPKH dan Pendamping PKH sudah dilakukan dengan baik melalui rapat yang diadakan di kantor Dinas Sosial. Sedangkan informasi dan sosialisasi yang disampaikan oleh pendamping PKH kepada

keluarga penerima manfaat (KPM) juga sudah disampaikan dengan baik, namun masih ada keluarga penerima manfaat yang masih belum memahami informasi yang disampaikan terutama lansia. Sumber daya manusia dan fasilitas dalam pelaksanaan PKH sudah cukup baik. Sikap pelaksana dalam implementasi PKH sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Struktur organisasi dalam implementasi PKH di Desa Sumberlele sudah sesuai dengan SOP.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Jawa Timur. (2023). Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ribu Jiwa), 2023. BPS Provinsi Jawa Timur (Statistics Jawa Timur). <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/421/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>
- Daud, M., & Marini, Y. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *Jurnal Humaniora*, 1, 29–38. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora>
- Finky Anbia. (2022). EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH).
- Kemensos RI. (2023). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kemensos Republik Indonesia. <https://siks.kemensos.go.id/>
- Kementerian Sosial, I. (2018). Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Perundang-Undangan, 1(BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA), BN.2018/NO.187, jdih.kemsos.go.id : 35 hlm.
- Lexy J. Moleong. (2007, April). Metodologi Penelitian Kualitatif. https://drive.google.com/file/d/1-HWimTYbLotvY81dB7Bvt_tyZ8TfYGZ7/view?usp=sharing.
- Mahulette, A., Marthinus Osok, R., & Salomo Leuwol, F. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan pada Masyarakat Negeri Assilulu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Vol. 1).
- Nana Sudjana, & Ibrahim. (2012). Penelitian dan penilaian pendidikan. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012.

- Nasution. (1996). Metode penelitian naturalistik kualitatif. Tarsito.
https://books.google.co.id/books/about/Metode_penelitian_naturalistik_kualitati.html?id=qwIrnQEACAAJ&redir_esc=y
- RI, P. (2021). Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Peraturan Perundang-Undangan, 3(Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/171535/permensos-no-3-tahun-2021>
- Sri Ramayanti. (2022). PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI KECAMATAN BUKIT KEMUNING), 1–60.
- Sudjarwo. (2011). METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL. In METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL.
https://www.academia.edu/31887852/METODOLOGI_PENELITIAN
- Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan : (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D) (Alfabeta, Ed.; Cet. 6, Vol. 6). 2008.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=281396#>
- Suharsimi Arikunto. (2010). Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik / Suharsimi Arikunto. Jakarta: Rineka Cipta.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=801361>
- AG. Subarsono. (2018). Analisis kebijakan publik : Konsep teori dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwi Nurani. (2029). Analisis Implementasi. Retrieved from Universitas Indonesia Library:
<https://lib.ui.ac.id/login.jsp?requester=file?file=digital/129255-T%2026794-Analisis%20implementasi-HA.pdf>
- Kartiawati. (2017). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan. Kampung Bonglai: Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung.
- Suharto. (2015). SKEKERASAN TERHADAP ANAK RESPON PEKERJAAN SOSIAL. Universitas Gajah Mada.
- Undang-Undang RI, Pasal 1 Ayat 1. (Nomor 11 tahun 2011). Tentang Kesejahteraan Sosial, . Republik Indonesia.

